Jakarta, 24 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/KPU.01/05/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 23 Mei 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prima Nugraha

Alamat : Jalan Proklamasi No. 31, Surabaya, Jawa Timur

 nomor telepon/HP: 081312345678

 email: rahardian.calegdpd@gmail.com

NIK : 3051401197830001

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK.01/05/2019 memberi kuasa kepada:

1) Indriyani, S.H. [NIK. 36723045278; Kartu Advokat. 20956]

2) Ardiansyah, S.H,, [NIK. 36723068265; Kartu Advokat. 33054]

3) Petra, S.H. [NIK. 36733067349; Kartu Advokat. 33057]

4) Rahman, S.H. [NIK. 36713059343; Kartu Advokat. 238565

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Indriyani and Partners yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 100, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP: 021-987654, *email*: indri.lawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai..............................................................................**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum,** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai ........................................................................**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/KPU.01/05/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.00 WIB, sebagai berikut:

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/KPU.01/05/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 23 Mei 2019;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD.
7. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
8. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah perseorangan peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur, Nomor Urut 21;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/KPU.01/05/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 23 Mei 2019.
12. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online)*;
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/KPU.01/05/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 23 Mei 2019 pukul 15.00 WIB;
16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2019 pukul 13.00 WIB.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
18. **POKOK PERMOHONAN**

 Bahwa Perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/KPU.01/05/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 23 Mei 2019, adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPD** | **Jumlah** |
|
| 21 | Prima Nugraha | 700.000 |
| 25 | Abdul  | 1.850.000 |
| 29 | Arinta  | 780.000 |
| 28 | Mahesa Jaya | 800.000 |
| 27 | Dewi Pertiwi | 605.000 |
| 30 | Ramlan  | 650.000 |
| 35 | Soraya | 710.000 |
|  | Jumlah | 6.095.000 |

 Bahwa perolehan suara sebagaimana tabel di atas adalah tidak benar dikarenakan terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara calon lain di beberapa kabupaten/kota sebagai berikut:

**4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA**

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU *a quo* secara nasional untuk Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur yang sangat merugikan Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) dari perolehan suara Pemohon sebanyak 700.000 suara. Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 710.000 suara sehingga menempati urutan keempat dan terpilih sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili Provinsi Jawa Timur.

Selisih suara tersebut terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon karena adanya kesalahan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut:

**4.1.1. KABUPATEN SIDOARJO**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN SIDOARJO,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPD** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 21 | Prima Nugraha | 19.000 | 23.000 | 4000 |
| 25 | Abdul  | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 29 | Arinta  | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 28 | Mahesa Jaya | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 27 | Dewi Pertiwi | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 30 | Ramlan  | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 35 | Soraya | 20.000 | 16.000 | -4000 |
|  | Total | 161.000 | 161.000 |  |

Bahwa menurut Pemohon, di Kabupaten Sidoarjo Pemohon memperoleh 23.000 (dua puluh tiga ribu) suara. Namun berdasarkan rekapitulasi Termohon, Pemohon hanya memperoleh 19.000 (sembilan belas ribu) suara. Selisih 4.000 (empat ribu) suara tersebut disebabkan adanya:

1. *Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sidoarjo pada TPS 2 Desa Ibu-ibu sebanyak 50 suara, TPS 4 Desa Ibu-Ibu sebanyak 50 suara, dan TPS 5 sebanyak 50 suara (bukti P-5), di Kecamatan Balongbendo sebanyak 300 suara (bukti P-6), Kecamatan Buduran sebanyak 400 suara (bukti P-7), Kecamatan Candi sebanyak 250 suara (bukti P-7.1), Kecamatan Gedangan sebanyak 500 suara (bukti P-8) dan Kecamatan Krian sebanyak 400 suara (bukti P-9);*
2. *Penambahan suara bagi calon lain yang seharusnya menjadi suara Pemohon di Kecamatan Prambon pada TPS 2 sebanyak 50 suara, TPS 4 sebanyak 50 suara, dan TPS 5 sebanyak 50 suara (bukti P-10), di Kecamatan Porong sebanyak 300 suara (bukti P-11), Kecamatan Sedati sebanyak 400 suara (bukti P-12), Kecamatan Sukodono sebanyak 250 suara (bukti P-12.1), Kecamatan Gedangan sebanyak 500 suara (bukti P-13) dan Kecamatan Krian sebanyak 400 suara (bukti P-14);*
3. *Pemohon menemukan bahwa fakta di lapangan, terdapat oknum KPPS di Desa Ibu-Ibu yang mengubah perolehan suara di Form C-1 yang dilakukan di tengah terjadinya pemadaman listrik. Bahwa oknum tersebut bekerja sama dengan oknum pemerintahan Desa sehingga dapat secara leluasa mengubah Form C-1 di Kecamatan Sidoarjo sehingga suara yang kemudian menjadi dasar penghitungan adalah tidak benar.*
4. *Bahwa Pemohon mengetahui adanya oknum KPPS yang mengubah angka pada form C-1 tanpa sepengatahuan saksi Pemohon, sehingga C-1 milik saksi Pemohon angkanya berbeda dengan C-1 yang digunakan oleh Termohon yaitu pada Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Krian. Tim Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. (Bukti P-29).*
5. *Bahwa ada ketidaksesuaian angka antara Form C-1 yang dimiliki saksi Pemohon dengan Form C-1 yang digunakan oleh Termohon untuk melakukan rekapitulasi di Kecamatan Prambon, Kecamatan Porong, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Krian. Menurut Pemohon Form C-1 tersebut sengaja dipalsukan untuk merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait. Tim Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. (Bukti P-30).*

**4.1.2. KOTA MALANG**

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA MALANG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPD** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 21 | Prima Nugraha | 15.000 | 21.000 | 6000 |
| 25 | Abdul  | 41.000 | 41.000 | 0 |
| 29 | Arinta  | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 28 | Mahesa Jaya | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 27 | Dewi Pertiwi | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 30 | Ramlan  | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 35 | Soraya | 20.000 | 14.000 | -6000 |
|  | Total | 158.000 | 158.000 |  |

Bahwa menurut Pemohon, di Kota Malang, Pemohon memperoleh 21.000 (dua puluh satu ribu) suara. Namun berdasarkan rekapitulasi Termohon, Pemohon hanya memperoleh 15.000 (lima belas ribu) suara. Selisih 6.000 (enam ribu) suara tersebut disebabkan adanya:

1. *Pengurangan* suara *Pemohon di* Kecamatan Klojen sebanyak 960 suara (bukti P-15), di Kecamatan Blilmbing sebanyak 1050 suara (bukti P-16), Kecamatan Lowokwaru sebanyak 1140 suara *(bukti P-17), Kecamatan Sukun sebanyak 1100 suara (bukti P-17.1), dan Kecamatan Kedungkandang sebanyak 1750 suara (bukti P-18);*
2. *Menurut temuan tim Pemohon, pada rapat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dari semua kecamatan tersebut di atas, form C-1 yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi angkanya banyak yang diubah dan dicoret sehingga berbeda dengan angka pada form C-1 milik Pemohon. Perubahan dan pencoretan tersebut mengakibatkan Pemohon berkurang perolehan suaranya sebagaimana diuraikan di atas. Diduga terdapat oknum KPPS atau PPK yang mengubah secara sepiihak formulir rekapitulasi tingkat TPS untuk kepentingan Pihak Terkait. Saksi Pemohon telah mengajukan protes pada saat rapat rekapitulasi namun tidak ditanggapi.*
3. *Terhadap pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Malang namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.*

**4.2. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI JAWA TIMUR**

Berdasarkan uraian tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di 2 Kabupaten/Kota tersebut di atas dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) dari total perolehan suara Pemohon sebanyak 700.000 suara, sehingga perolehan suara Pemohon seharusnya sebanyak 710.000 suara. Adapun perolehan suara Calon Nomor Urut 35 seharusnya sebanyak 700.000 suara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon seharusnya menempati urutan keempat dan terpilih sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon** **Anggota DPD** | **Kabupaten/Kota** | **Jumlah** |
| **Sidoarjo** | **Malang** | **Madiun** | **Blitar** |
| 21 | Prima Nugraha | 23.000 | 21.000 | 110.257 | 115.980 | 270.237 |
| 25 | Abdul  | 40.000 | 41.000 | 300.000 | 258.000 | 639.000 |
| 29 | Arinta  | 25.000 | 25.000 | 150.000 | 98.900 | 298.900 |
| 28 | Mahesa Jaya | 30.000 | 30.000 | 120.500 | 100.000 | 280.500 |
| 27 | Dewi Pertiwi | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 117.000 | 237.000 |
| 30 | Ramlan  | 17.000 | 17.000 | 120.500 | 118.535 | 273.035 |
| 35 | Soraya | 16.000 | 14.000 | 112.500 | 125.000 | 267.500 |
|  | Jumlah | 161.000 | 158.000 | 1.013.757 | 933.415 | 2.266.172 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon** **Anggota DPD** | **Jumlah Pindahan** | **Kabupaten/Kota** | **Jumlah** |
| **Tuban** | **Ngawi** | **Pacitan** | **Kediri** |
| 21 | Prima Nugraha | 270.237 | 98.000 | 135.000 | 155.000 | 51.763 | 710.000 |
| 25 | Abdul  | 639.000 | 275.500 | 321.800 | 350.800 | 262.900 | 1.850.000 |
| 29 | Arinta  | 298.900 | 300.500 | 80.000 | 59.000 | 41.600 | 780.000 |
| 28 | Mahesa Jaya | 280.500 | 155.000 | 135.000 | 145.700 | 83.800 | 800.000 |
| 27 | Dewi Pertiwi | 237.000 | 110.000 | 98.800 | 100.000 | 59.200 | 605.000 |
| 30 | Ramlan  | 273.035 | 135.000 | 100.000 | 96.000 | 45.965 | 650.000 |
| 35 | Soraya | 267.500 | 115.000 | 101.000 | 111.000 | 105.500 | 700.000 |
|  | Jumlah | 2.266.172 | 1.189.000 | 971.600 | 1.017.500 | 650.728 | 6.095.000 |

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/KPU.01/05/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 23 Mei 2019 pukul 15.00 WIB;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Timur, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPD** | **Perolehan Suara** | **Peringkat** |
| 21 | Prima Nugraha | 710.000 | 4 |
| 25 | Abdul  | 1.850.000 | 1 |
| 29 | Arinta  | 780.000 | 3 |
| 28 | Mahesa Jaya | 800.000 | 2 |
| 27 | Dewi Pertiwi | 605.000 |  |
| 30 | Ramlan  | 650.000 |  |
| 35 | Soraya | 700.000 | 5 |
|  | Total | 6.095.000 |  |

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**Kuasa Hukum Pemohon**

|  |  |
| --- | --- |
| ttd.**Indriyani, S.H.,** | ttd.**Ardiansyah, S.H,,** |
| ttd.**Petra, S.H.,** | ttd.**Rahman, S.H.** |